



Media: Harian Jogja

Hari: Sabtu

Tanggal: 05 September 2020

Halaman: 4

Jangan Hanya karena Gagap Administrasi, UKM Gagal Terima Bantuan

Ketidaklengkapan berkas membuat pelaku usaha kecil menengah di Jogja gagal mendapatkan bantuan pemerintah bagi usaha mikro (BPUM) sebesar Rp2,4 juta yang sudah mulai dicairkan pemerintah.

Berdasarkan data Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kota Jogja, dari total 26.000 usaha kecil dan menengah (UKM) yang terdaftar, baru 6.900 di antaranya yang mengajukan permohonan BPUM. Parahnya, dari 6.900 yang mendaftar BPUM, hanya sekitar 50% saja yang lolos verifikasi. Sedikitnya pendaftar

BPUM di Kota Jogja dapat disebabkan salah satunya banyaknya bantuan kepada UKM sebelum turunnya BPUM sehingga UKM yang sebelumnya telah mendapatkan bantuan mungkin tidak mendaftar di BPUM.

Adapun syarat UKM untuk menerima BPUM antara lain memiliki KTP elektronik Kota Jogja; memiliki Izin Usaha Mikro (IUM); bukan aparatur sipil negara (ASN), TNI, BUMN, dan BUMD; serta tidak sedang mengakses kredit modal kerja dan investasi dari perbankan.

Ini perlu jadi perhatian tersendiri bagi para pelaku UKM untuk melengkapi

usahanya dengan dokumen seperti itu. Salah satunya karena bisa jadi jalan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah guna meningkatkan level usahanya.

Lebih dari itu, persoalan pendampingan dari pemerintah juga tak bisa dikesampingkan. Pemerintah hendaknya juga lebih intens dalam melakukan pendampingan.

Terlebih masih minimnya pendaftar juga dapat dikarenakan tidak semua pelaku UKM melek teknologi. Memang, selama ini pemerintah mengklaim telah menyosialisasikan soal syarat-syarat pengajuan BPUM itu lewat

kader forum komunikasi tingkat kecamatan sehingga keterjangkauan informasi seharusnya sudah dapat tercakup.

Pemberdayaan UKM melalui pendampingan merupakan langkah strategis untuk memajukan UKM agar tumbuh dan berkembang secara matang. Munculnya berbagai permasalahan dalam mengelola sebuah usaha hendaknya dijadikan sarana pembelajaran untuk menemukan solusi terbaik.

Tidak satupun UKM yang tidak mengalami kendala dalam pertumbuhannya. Akan tetapi setiap kendala hendaknya

dijadikan tantangan untuk melakukan perbaikan dalam semua aspek manajemen di dalamnya.

Maka untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Pemerintah hendaknya menyediakan tenaga pendamping yang handal yang memiliki kapasitas mampu menangani dan menyelesaikan setiap masalah yang muncul pada UKM, serta meningkatkan kapasitas pendamping UKM melalui pelatihan dan bimbingan berkesinambungan. Karena seiring berjalannya waktu, akan semakin beragam

pula tingkat kesulitan dan masalah yang akan dihadapi di lapangan!

Selain pendampingan soal administrasi, dukungan dari pemerintah juga sangat dibutuhkan terkait dengan program khusus pemberdayaan UKM. Salah satunya adalah lewat anggaran khusus guna memajukan UKM, baik untuk UKM itu sendiri, maupun untuk kesejahteraan pendampingnya.

Di setiap daerah, kiranya perlu disediakan sebuah wadah pelayanan yang maksimal untuk membantu UKM agar dapat berkembang lebih baik lagi.

Netral Biasa Jumpa Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 15 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005